



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 130/992/KEP.01/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI PIDIE NOMOR
130/15/KEP.01/2025 TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN BUPATI PIDIE TAHUN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi Penetapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Pidie Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Belas Atas Keputusan Bupati Pidie Nomor 130/15/KEP.01/2025;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Keputusan Bupati Pidie Nomor 130/15/KEP.01/2025 tentang Penetapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Pidie Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020;

Memperhatikan: Surat Bupati Pidie Nomor 180/3948/2024 Tanggal 11 November 2024 Perihal Rencana Penyusunan Peraturan Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN:

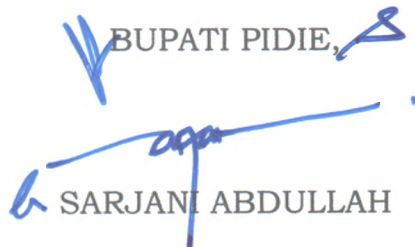
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI PIDIE NOMOR 130/15/KEP.01/2025 TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PIDIE TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah lampiran Atas Keputusan Bupati Pidie Nomor 130/15/KEP.01/2025 tentang Penetapan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Pidie Tahun 2025, sehingga seluruh bunyi lampiran dimaksud menjadi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada Tanggal : 14 November 2025 M
23 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE

Nomor : 130/992 /KEP.01/2025

Tanggal : 14 November 2025 M

23 Jumadil Awal 1447 H

JUDUL PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI PIDIE TAHUN 2025

NO.	JUDUL PERATURAN BUPATI	SKPK PEMRAKARSA	KET.
1	2	3	4
1	TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT GAMPONG KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
2	TATA CARA PEMILIHAN IMUEM MEUNASAH	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
3	PERESMIAN TUHA PEUET GAMPONG KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
4	PERSYARATAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUET GAMPONG DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA TUHA PEUET GAMPONG KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
5	MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TUHA PEUET GAMPONG KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
6	PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
7	RENCANA AKSI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
8	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN (SIMTANAH) KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
9	PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGGAPAN KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PENGANGKATAN KEUCHIK DAN IMUM MUKIM KEPADA WAKIL BUPATI	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
10	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG BENTENG KECAMATAN KOTA SIGLI DAN GAMPONG BLANG PASEH KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
11	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG BLOK BENGKEL KECAMATAN KOTA SIGLI DAN GAMPONG BENTENG KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
12	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG KUALA PIDIE KECAMATAN KOTA SIGLI DAN GAMPONG BENTENG KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
13	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG LAMPOH KRUENG KECAMATAN KOTA SIGLI DAN GAMPONG KRAMAT LUAR KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
14	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG PANTE TEUNGOH KECAMATAN KOTA SIGLI DAN GAMPONG BENTENG KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
15	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG PASI RAWA KECAMATAN KOTA SIGLI DAN GAMPONG KRAMAT LUAR KECAMATAN KOTA SIGLI KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
16	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG BLANG DALAM KECAMATAN MANE DAN GAMPONG LUTUENG KECAMATAN MANE KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
17	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH GAMPONG BLANG DALAM KECAMATAN MANE DAN GAMPONG TURUE CUT KECAMATAN MANE KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	

1	2	3	4
18	PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH GAMPONG BLANG KECAMATAN MILA DAN GAMPONG LAGANG KECAMATAN MILA KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
19	PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH GAMPONG LUTUENG KECAMATAN MANE DAN GAMPONG TURUE CUT KECAMATAN MANE KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
20	PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH GAMPONG PULO TANJONG KECAMATAN MILA DAN GAMPONG LAGANG KECAMATAN MILA KABUPATEN PIDIE	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	
21	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE	
22	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE	
23	PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE	
24	PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA PD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE	
25	RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN PIDIE	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE	
26	RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PEMUKIMAN KUMUH DAN PERUMAHAN KUMUH (RP2KPKPK)	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE	
27	RENCANA INDUK PETA JALAN DAN PEMAJUAN IPTEK DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE	
28	PENETAPAN KELOMPOK KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PIDIE	
29	PEMETAAN KAWASAN PESISIR DAN KAWASAN TAMBAK	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PIDIE	
30	IZIN USAHA TAMBAK UDANG	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PIDIE	
31	IZIN RUMPON/SITUAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PIDIE	
32	PENERBITAN REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK PELAKU USAHA PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PIDIE	
33	TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2025;	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
34	TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA GAMPONG KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2025;	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
35	TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2025;	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
36	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2025;	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
37	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2025; (PERKIRAAN)	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	

1	2	3	4
38	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2025;	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
39	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2025;	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
40	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2026	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
41	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2025;	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
42	STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2026;	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
43	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH;	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
44	KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KABUPATEN PIDIE;	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
45	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE;	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
46	TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE;	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
47	PENETAPAN BESARAN DAN PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN PIDIE.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
48	PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE	
49	TATA CARA KERJA SAMA GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE	
50	PEDOMAN EVALUASI PERKEMBANGAN GAMPONG DAN KELURAHAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE	
51	RINCIAN PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE	
52	PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE	
53	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN TUHA PEUT GAMPONG SERTA HONORARIUM IMUEM DAN BILEUE MEUNASAH DALAM KABUPATEN PIDIE	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE	
54	PEDOMAN DAN PEMBENTUKAN BUMG/BUMG BERSAMA DAN BUMG BERSAMA LKD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE	
55	RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN KABUPATEN PIDIE	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE	
56	PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG DAN LEMBAGA ADAT GAMPONG	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KABUPATEN PIDIE	
57	PENETAPAN TITIK PARKIR DALAM KABUPATEN PIDIE	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PIDIE	
58	PENETAPAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI WILAYAH KABUPATEN PIDIE	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PIDIE	
59	PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PIDIE	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PIDIE	

1	2	3	4
60	PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
61	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPA)	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. PIDIE	
62	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA (BLK)	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. PIDIE	
63	BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. PIDIE	
64	PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. PIDIE	
65	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KABUPATEN PIDIE	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. PIDIE	
66	STANDAR PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PIDIE	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. PIDIE	
67	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) COT PADANG LILA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. PIDIE	
68	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS KABUPATEN PIDIE	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. PIDIE	
69	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UPTD RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI' I BEREUNUEN KABUPATEN PIDIE	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. PIDIE	
70	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. PIDIE	
71	SILPA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025	DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE	
72	KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025	DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE	
73	PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025	DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE	
74	PENETAPAN AMBANG BATAS BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI	
75	PELAYANAN KEFARMASIAN APOTEK ELEKTRONIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI	
76	DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PIDIE	
77	TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN PIDIE	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE	
78	PEMBENTUKAN DAYAH MADRASAH ULUMUL QUR'AN (MUQ) PIDIE	DINAS PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN PIDIE	
79	PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMUM MUKIM SERTA SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK KEPADA WAKIL BUPATI	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKAB. PIDIE	

4

1	2	3	4
80	PERCEPATAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025-2030	BAGIAN UMUM SETDAKAB. PIDIE	
81	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB. PIDIE	
82	PENGELOLAAN KEUANGAN UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI	
83	PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH SYARIAH	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PIDIE	
84	STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
85	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDAKAB PIDIE	
86	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
87	RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) KABUPATEN PIDIE	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PIDIE	
88	RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
89	RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN HAK TAYANG DAN LAYANAN IKLAN PADA VIDEOTRON MILIK PEMERINTAH DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN PIDIE	
90	TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE	SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE	
91	STANDAR BIAYA PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE.	INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE	
92	PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.	INSPEKTORAT KABUPATEN PIDIE	
93	PENYELENGGARAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PIDIE	
94	PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE	
95	ASURANSI BARANG MILIK DAERAH UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. CHIK DITIRO SIGLI	
96	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN	
97	PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE	
98	TATA CARA PEMBAYARAN HAK KEUANGAN, KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE, TENAGA PROFESIONAL BADAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE	SEKRETARIAT BADAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE	

1	2	3	4
99	KARTU PIDIE SEHAT PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE	DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE	
100	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PIDIE	
101	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE	

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH